

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURAPONTIANAK**

Oleh:

**KASTONO<sup>1\*</sup>**

NIM:E1012161079

Zulkarnaen<sup>2</sup>, Uly Nuzulian<sup>2</sup>

\*Email: tonopamaketo0903@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi program pendidikan profesi guru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan mengenai proses implementasi program pendidikan profesi guru ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih minimnya jumlah pelaksanaan program PPG yang dilaksanakan di LPTK Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menurut teori yang digunakan, teori Charles O. Jones (Gaffar 2006:89) dalam tiga tahap menunjukkan bahwa: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah dalam tahap pengorganisasian belum sepenuhnya efektif, dimana penetapan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program pendidikan profesi guru PPG di FKIP Untan sudah sesuai dengan timeschedule yang ditetapkan oleh pusat. 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah peserta kurang dalam memahami isi dan tujuan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak. 3) Aplikasi, pelaksanaan kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru PPG belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat kendala-kendala. Kendala yang sering terjadi dalam Program Pendidikan Profesi Guru PPG adalah guru yang gaptek teknologi dan kondisi geografis. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu dalam interpretasi dimana dalam sosialisasi dan penyampaian materi dalam program PPG lebih dimaksimalkan lagi sehingga program pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, Pendidikan Profesi Guru.

**KASTONO, NIM. E1012161079**

*Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang penelitian

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru adalah dengan menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program PPG merupakan pendidikan lanjutan kepada sarjana yang berminat untuk menjadi guru yang profesional, program PPG merupakan sarana ataupun merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat guru sebagai Suatu bukti guru professional. Pendidikan profesi guru yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti yaitu: Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Pendidikan profesi guru Prajabatan di peruntukan kepada lulusan sarjana yang berminat menjadi guru yang masih bersifat fresh graduate (baru menyelesaikan studi).

Berdasarkan data dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Kalimantan Barat dari tahun ketahun jumlah guru di Kalimantan Barat semakin bertambah hingga mencapai 60 ribu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik Guru SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, belum lagi ditambah dengan lulusan sarjana guru baru di berbagai universitas baik negeri maupun swasta yang ada di Kalimantan Barat.

Untuk memenuhi kualifikasi, agar guru-guru di Kalimantan Barat memiliki

sertifikat pendidik, untuk itu LPTK di Kalimantan Barat yaitu Universitas Tanjungpura melaksanakan program pendidikan profesi guru (PPG) yang dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura.

Sejak tahun 2016 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah menyelenggarakan program pendidikan profesi guru. Berdasarkan keputusan mentririset, teknologi, dan pendidikan tinggi tentang izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru pada Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Memberikan izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru dalam 10 bidang studi Pada Universitas Tanjungpura, khususnya Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan di kota Pontianak.

Program studi PPG yang dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak sejak tahun 2016 hingga sekarang LPTK di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura sudah menyelenggarakan 7 (tujuh) Program studi dari 10 (Sepuluh) program studi yang dilaksanakan, dan masih ada 3 (tiga) program studi lagi yang belum mendapat jatah pelaksanaan program PPG di

**KASTONO, NIM. E1012161079**

*Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN*

Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dengan tujuan suatu program untuk memenuhi guru yang bersertifikasi akan terhambat, bila dilihat dari jumlah data guru pertahun dan minimnya kuota PPG diberikan kepada LPTK, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, sehingga bisa membuat guru-guru yang ada di Kalimantan barat terkendala untuk mendapatkan sertifikasi mengajar sehingga Guru- guru yang ada di Kalimantan Barat mencari LPTK lain yang juga menyelenggarakan Program PPG yang sesuai dengan Program studi Yang ditempuhnya.

Kemudian keterbatasan SDM (Tenaga Pendidik) yang memenuhi persyaratan Kualifikasi mengajar masih menjadi kendala dalam implementasi pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung pura Pontianak. Berdasarkan syarat ketentuan dosen untuk bisa mengajar program PPG yaitu haruslah sudah mencapai golongan IV/d – IV/a (Lektor Kepala), karena Persyaratan ini terlalu berat maka diturunkanlah menjadi golongan III/d – III/c (Lektor). Walaupun syarat untuk mengajar dosen sudah

diturunkan dari lektor Kepala keLektor, tetap saja Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan masih kekurangan tenaga pendidik untuk mengajar di program pendidikan profesi guru.

Hombase Dosen fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Fkip Untan. Kita dapat mengetahui berdasarkan prodi yang ditunjuk untuk melaksanakan program PPG, bahwa yang mempunyai kualifikasi untuk mengajar PPG yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak sangatlah terbatas. Seperti prodi PGSD, PENJASKES, KIMIA, EKONOMI, SOSIOLOGI, BIOLOGI, DAN FISIKA. Dengan keterbatasan SDM (Tenaga pendidik) tersebut bisa saja menghambat proses dalam Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ada di kaliamantan Barat khususnya di dan Ilmu pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

## **2. Identifikasi masalah**

Adapun identifikasi permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Minimnya jumlah pelaksanaan program Bidang studi PPG yang diberikan oleh kemenristekdikti Kepada LPTK Universitas Tanjung pura setiap Tahunnya.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (lektor kepala dan lektor) yang memenuhi persyaratan kualifikasi mengajar PPG.

### **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penulis memfokuskan penelitian agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas maka peneliti hanya memfokuskan pada masalah “Proses Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

### **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskanlah masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana Proses Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak sudah berjalan dengan optimal?

### **5. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

### **6. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengkajian dan pengembangan ilmu, khususnya disiplin Ilmu Administrasi Publik dan sebagai masukan untuk referensi studi pustaka.

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan atau masukan pemikiran dan menulis karya ilmiah untuk penulis sendiri, bagi para pelaksana kebijakan dan organisasi pemerintahan terkait dengan profesi guru di intansi terkait.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas- tugas pemerintahnya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langkah- langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggaraan negara.

Charles O Jones dalam Gaffar (2006:89), mengatakan aktifitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut.

**1. *Organization; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.***

(Organisasi; penyempurnaan atau pengaturan ulang sumber daya, unit, dan metode untuk menjalankan kebijakan.)

**2. *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.***

(Interprestasi; diterjemahkan (sering kali tercakup dalam suatu ketetapan) kedalam rencana dan arahan yang layak dan sesuai rencana.)

**3. *Application; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.***

(Aplikasi; Pengaturan rutin berupa pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disepakati atas tujuan atau instrumen.)

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit, dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (realisasikan) kebijakan menjadi hasil. Sesuai dengan

apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas sinteprastasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (*routine provision of service, paymen, or other agree upon objectives or instruments*).

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dikarenakan penulis ingin mendiskripsikan bagaimana proses Pengorganisasian, bagaimana proses Interpretasi serta Aplikasi, secara mendalam mengenai Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi.

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak (FKIP Untan). Menurut Sugiyono (2009:109) subyek penelitian adalah sesuatu yang menunjukkan pada orang /individu atau kelompok yang dijadikan unit khusus atau kesatuan yang diteliti “Adapun subyek yang pada penelitian ini merujuk pada orang/individu maupun kelompok pertimbangan orang tersebut tahu apa yang kita harapkan.

Subyek penelitian ini adalah Ketua pengelola program studi PPG beserta jajarannya dan Dosen yang mengajar PPG di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Yang terdiri dari 10 prodi yang dilaksanakan.

Adapun Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Pendidikan Propesi Guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan lancar sesuai keinginan, akan ada permasalahan yang akan terjadi dalam pelaksanaannya karena implementasi kebijakan tidak akan dilakukan satu instansi tetapi bekerja sama dengan pihak pihak lain maka permasalahannya yang

**KASTONO, NIM. E1012161079**  
*Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN*

akan dihadapi pasti juga akan kompleks bagaimana kemampuan implementor kebijakan, hubungan kerjasama antara pelaksana serta bagaimana kebijakan dapat diterima oleh sasaran kebijakan.

Menurut, Charles O Jones dalam Gaffar (2006:89), mengatakan aktifitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut.

##### **1) Pengorganisasian**

Menurut Charles O Jones (1996:311) organisasi merupakan perhatian paling penting karena dapat dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan, Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang di rancang.

UU Nomor 14 Tahun 2005 “Tentang guru dan dosen”, menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang di persyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, Untuk mewujudkan kompetensi guru dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan profesi guru (PPG) akan dibahas mengenai pelaksanaan kebijakan program pendidikan profesi guru, standar operasional serta sumber daya keuangan

dan sumber daya peralatan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengorganisasiannya yaitu:

a. Implementasi Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Fkip Untan

Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan di laksanakan, penetapan kebijakan bukan sekedar penetapan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan. Tetapi juga menentukan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut. Dengan adanya peraturan program pendidikan profesi guru (PPG) oleh lembaga pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Program pendidikan profesi guru Fkip untan sebagai salah satu pelaksana kebijakan yang bertugas dalam melakukan sosialisasi dan pelayanan kepada anggota pengelola PPG dalam hal ini FKIP Universitas Tanjungpura melakukan sosialisasi melalui panitia yang terkaitdengan pelaksanaan PPG. wawancara keempat implementor yang merupakan tanggung jawab yang mana semua mempunyai tugas dan fungsi

masing-masing. Dalam pelaksanaan program pendidikan profrsi guru (PPG) tersebut dalam kebijakan ini kepemimpinan yang digunakan merupakan pola kologial yang masing-masing lembaga yang terkait mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam pelakasanaan harus saling bekerja sama guna mencapai keberhasilan dalam kebijakan tersebut.

b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standar operasional prosedur SOP sebagai pedoman, petunjuk,tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus di siapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin di capai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementor kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru yaitu PPG Fkip Untan dalam melaksanakan tugasnya mengarah kepada peraturan Undang-Undang Nomor 2014 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaan program PPG Fkip Untan di harapkan lebih terarah dan dapat memperkuat pencapaian tujuan. Untuk mengetahui bagaimana SOP ini dijalankan di program PPG Fkip Untan.

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua program studi pendidikan profesi guru (PPG) bapak Prof.Dr.H.M Asrori,M.Pd berikut penjelasannya: Standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan program PPG di FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak mengacu pada program kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh kemenristekdikti/kemenndikbud. Seluruh seleksi peserta yang dinyatakan lulus dan layak untuk diproses mengikuti PPG di tentukan oleh tes awal yang dilakukan oleh kemenristekdikti.

Dari hasil Wawancara tersebut maka diketahui bahwa proses implementasi program pendidikan profess iguru (PPG) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan SOP yang telah ditetapkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan seketaris bapak Drs. Kartono, M.Pd beliau menjelaskan bahwa: Standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan program PPG di FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak sudah ada mengacu pada program kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh kemenristekdikti/kemenndikbud. Seluruh

seleksi peserta yang dinyatakan lulus dan layak untuk diproses mengikuti PPG di tentukan oleh tes awal yang dilakukan oleh kemenristekdikti.

Dari hasil wawancara di FKIP di Universitas Tanjungpura diatas bahwa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ini lebih mengarah kepada peraturan pemerintah sebagai implementor dalam kebijakan program PPG dan dapat di kerjakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang menjadi tuntutan atau referensi sedangkan mengenai SOP dalam pelaksanaanya tugasnya hanya selaku implementor kebijakan PPG.

#### c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan SOP perlu di tetapkan besarnya sumberdaya keuangan yang akan digunakan serta peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tentunya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai baik itu sumber daya keuangan maupun sumberdaya peralatan untuk menjamin berlangsungnya

pelaksanaa kebijakan maka, untuk mencukupi anggaran sangat penting agar dapat berjalan dengan efektif efisien dan cepat dalam mencapai serta mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengetahui sumberdaya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Program PPG.

Peneliti melakukan wawancara dengan bendahara devisi keuangan program studi Pendidikan profesi guru (PPG) Ibu Dr.MARIA ULFAH, M.Si yang menyatakan bahwa penetapan anggaran program PPG FKIP Universitas Tanjungpura mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh kemenristekdikti/kemendikbud. Yang disesuaikan dengan anggaran nilai nominal sama, sehingga anggaran belanja (RAB) yang juga ditetapkan oleh pusat. Kecuali program PPG mandiri, biaya disesuaikan dengan Universitas masing-masing penyelenggara program PPG dengan ketentuan realistis dalam menganggarkan kegiatan dan dianggarkan dalam DIPA masing-masing Universitas. Anggran khusus pelaksanaan kebijakan PPG tersebut di tentukan oleh Pusat.

Sumber daya peralatan merupakan sarana atau alat penunjang yang diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan

secara optimal peralatan yang diperlukan meliputi gedung kantor kendaraan yang dibutuhkan dalam sosialisasi dan pembinaan kebijakan baik itu roda dua maupun roda empat serta adanya sarana pendukung yang lain membantu implementor dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terhadap peserta PPG adapun peralatan yang dibutuhkan oleh fakultas keguruan dan ilmu pendidikan sebagai berikut :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas TanjungPura Kota Pontianak saat ini memiliki sarana gedung kantor sebanyak 3 buah atau lokasi. Kegiatan dan fungsi yang dilakukan pada kantor yang terletak prof H. Hadari Nawawi Kota Pontianak yang digunakan dalam bidang ilmu keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak Kendaraan dinas operasional yang tersedia yaitu :

- Kendaraan roda 2 ada 2
- Kendaraan roda 4 ada 5

Sarana dan prasarana pendukung yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Untuk sarana PPG memanfaatkan fasilitas yang ada di fakultas karena pada prinsipnya untuk

penyelenggaraan program PPG mengacu pada ketentuan sarana dan prasarana pendidikan disiapkan oleh LPTK dalam hal ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, dalam biaya PPG lebih cenderung untuk kegiatan operasional akademik.

#### d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Kinerja pelaksanaan program menjadi baik setidaknya menjadi dimensi proses kebijakan, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini sangat penting tidak saja di jadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan terutama dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan.

Di dalam manajemen pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Program PPG semua berkoordinasi dan bekerjasama antara implementor dan program PPG. Sistem pelaksanaannya menggunakan tata pamong dan melibatkan lembaga

pemerintah melalui peraturan dan prosedur yang jelas.

#### e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pelaksanaan program PPG FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak secara serentak mengikuti timeschedule yang telah ditetapkan oleh pusat.

#### 2) Interpretasi

##### a. Pemahaman kebijakan program Pendidikan Profesi Guru

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan di sampaikan kepada peserta terutama sasaran kebijakan. Sulit untuk mencapai tujuan dari kebijakan apabila implementor tidak memahami kebijakan dan tugasnya dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan ketua pengelola program studi pendidikan profesi guru PPG diketahui bahwa ketua pengelola telah memahami isi kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang program pendidikan profesi guru PPG.

Dimana program pendidikan profesi guru menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan dasar hukum yang digunakan dalam proses implementasi pelaksanaan Program pendidikan profesi guru PPG di Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan yang memegang peranan penting dalam suatu implementasi. Pengetahuan dan pemahaman implementor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, Sosialisasi sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif bisa terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik dan disosialisasikan dengan baik karena sering kali terjadi masalah dalam sosialisasi yaitu adanya pengertian miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus di lalui dalam proses penyampaian informasi kepada peserta.

Implentasi dapat berjalan dengan lancar dari sebuah kebijakan perlu di dahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Pengetahuan pemberian informasi ini agar kelompok sasaran dapat memahami kebijakan yang telah di implementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah akan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tujuan kebijakan, sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dengan cara dilakukannya pertemuan antara implementor kebijakan serta pihak-pihak yang terkait.

Dari hasil wawancara diatas dari Program PPG FKIP Universitas Tanjungpura sudah melakukan sosialisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung yang di sampaikan melalui kegiatan sosialisasi penyelenggara dan melalui media komunikasi lainnya. Dosen sebagai pelaksana kebijakan program PPG mereka hanya di beri kewenangan untuk mengajar sesuai SOP dan untuk sosialisasi program PPG dosen tidak ikut serta dilibatkan. Staf devisi program PPG sebagai pelaksana kebijakan program PPG mereka hanya di berikewenangan untuk mengurus/melengkapi surat menyurat dan pemberkasan-pemberkasan lain dengan

sesuai SOP walaupun untuk sosialisasinya tidak dilibatkan secara langsung.

### 3) Aplikasi

Tahap aplikasi (dalam widodo, 2010:94) merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan menjadi penyediaan barang dan jasa serta penerapan segala keputusan dan peraturan. Pelaksanaan kebijakan yang bersifat dinamis serta sangsi atau penindakan dalam sebuah permasalahan yang terjadi pada keluarga menjadi aspek pada variable aplikasi.

#### a. Pelaksanaan penerapan program Pendidikan Profesi guru

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang keluarga berencana:Peneliti melakukan wawancara dengan ketua program studi pendidikan profesi guru (PPG) Fkip Universitas Tanjungpura Pontianak. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan program profesi guru PPG difkip Untan tersebut. Dalam hal ini implementor saling berkaitan punya **KASTONO, NIM. E1012161079**  
*Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN*

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### b. Kendala dan Pelaksanaan terhadap program Pendidikan Profesi Guru.

Untuk mengetahui dan menjamin bahwa implementasi pelaksanaan kebijakan program profesi guru PPG di fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Tanjungpura ini berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan pemerintah haruslah ada tindak lanjut dari sebuah kasus atau masalah agar sesuai dengan aturan tersebut. Salah satunya penindakan dalam sangsi terhadap melanggar kebijakan tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pak Gregorius Ato pendidikan bahasa Inggris peserta Program PPG kekurangan dan kelebihan dalam Program PPG. Dari wawancara dapat di simpulkan bahwa kendala yang sering terjadi dalam Program Pendidikan Profesi Guru PPG adalah guru yang gaptek teknologi dan kondisi geografis. Pelaksana kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru PPG belum sepenuhnya optimal. Karena masih terdapat kendala-kendala.

Dengan lebih aktif memberikan pelayanan, sosialisasi dan pembinaan

dalam memberikan kebijakan PPG serta dapat memfasilitasi dari segi sarana dan prasarana dan juga peran peserta dalam berkontrasi yang merupakan pengaruh besar dalam memberikan dukungan serta menjalankan proses implementasi pelaksanaan kebijakan program Pendidikan profesi guru PPG di FKIP Untan ini agar dapat berjalan dengan baik serta dapat bersama sama mewujudkan tenaga pendidik yang baik belakang ilmu kearsipan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah dikemukakan peneliti maka,terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dan pembahasan tersebut yaitu:

1. Tahap pengorganisasian dalam implementasi pelaksanaan program pendidikan profesi Guru (PPG) di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak belum sepenuhnya efektif dikarenakan beberapa hal yaitu :

Dalam implemenmentasi pelaksanaan sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam

pembinaan ,pelayanan,dan sosialisasi dari keempat implementor. Untuk Standar Operasional (SOP) sendiri telah adanya SOP yang mengatur tentang waktu prosedur dalam pelaksanaan kebijakan untuk tugas dari masing masing implementor tersebut. Sumber daya keuangan sendiri ini di tetapkan oleh kementeriandikti/kemendikbud yang di sesuaikan dengan anggaran nilai nominal sama berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) juga ditetapkan oleh pusat.

Untuk penetapan manajemen dalam Implementasi pelaksanaan Pelaksanaan penetapan manajemen yang kami lakukan dalam bentuk kerjasama Tatapamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tatapamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, danstudio). Sistem tatapamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus

diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi melalui peraturan dan prosedur yang jelas. Sudah di koordinasikan semaksimal mungkin dengan pihak-pihak terkait. Untuk penetapan jadwal kegiatan tersebut dalam implementasi pelaksanaan program pendidikan profesi guru PPG di Fkip Untan secara serentak mengikuti timeschedule yang di tetapkan oleh pusat.

2. Untuk Tahap interpretasi pada implementasi kebijakan PPG FKIP untan masih kurang Optimal

Pemahaman isi dan tujuan tentang keempat implementor kegiatan PPG sudah memahami tetapi peserta belum atau kurang dalam memahami dengan isi dan tujuan tersebut .

Sosialisasi sudah dilakukan oleh FKIP Univrsitas Tanjung Pura secara Konferenship dengan melalui dua cara yaitu baik langsung maupun dengan media elektronik sesuai kebutuhan.

## 2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas peneliti bermaksud memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang terjadi dalam proses implementasi pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fkip

Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai berikut:

### 1. Organisasi

Diharapkan fakultas ilmu keguruan dan pendidikan juga ikut berperan dalam menjalankan implementasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fkip Universitas Tanjungpura Pontianak dengan cara memberikan segala fasilitas untuk kegiatan PPG yang dilakukan serentak oleh pusat.

### 2. Interpretasi

Diperlukan turunan kebijakanseperti peraturan dari kementerian dan kemendikbud terkait implementasi kebijakan pelaksanaan Program PPG di Fkip Untan agar dalam pelaksanaanya dengan jelas siapa yang menjadi leading sektor atau yang ditunjukan sebagai penanggung jawab atas kebijakan tersebut.

### 3. Aplikasi

Sudah dilakukan jadwal pembinaan dan sosialisasi secara serentak yang ditetapkan oleh pusat dengan waktu dan tanggal yang berbeda sudah dijadwalkan.

## F. REFERENSI

### Buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Joko Widodo, 2006.  
*Analisis Kebijakan publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing.

Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru

RISTEKDIKTI pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru.

Moeleong, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT remajarosdakarya.

Sugyono, 2017.  
*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2002.  
*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Menuju Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, proses, studikusus.* Jakarta: Media Persindo.

## Dokumen

Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Profesi Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 776/KPT/I/2008 Tentang Izin Pembukaan Program Studi pendidikan profesi Guru Pada Universitas Tanjungpura di kota Pontianak.

SK Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Nomor 308/UN22.6/KP/2018 Tentang Tata Pamong dan Tupoksi

**KASTONO, NIM. E1012161079**  
*Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN*